

PERAN DESENTRALISASI FISKAL DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN KOTA MALANG

**Adrea Aptarizqu Elvaretta¹⁾, Fauziah Ramadhani Baktiar²⁾, Eva Hany Fanida³⁾,
Melda Fadiyah Hidayat⁴⁾**

^{1),2),3),4)}Universitas Negeri Surabaya

**Email : 25040674299@mhs.unesa.ac.id¹⁾, 25040674300@mhs.unesa.ac.id²⁾,
evafanida@unesa.ac.id³⁾, meldahidayat@unesa.ac.id⁴⁾**

Abstract: *The financial relationship between the central and regional governments is a crucial aspect of Indonesia's decentralized governance system. Through fiscal decentralization policies, regional governments are given the authority to manage regional finances to improve public services and promote regional development. This study aims to analyze how the financial relationship between the central and regional governments supports development in Malang City. This study uses a qualitative approach, collecting data through literature studies from various journals, policy documents, and government reports related to central and regional fiscal relations. The study results indicate that the financial relationship between the central and regional governments is realized through fund transfer mechanisms such as the General Allocation Fund (DAU), Special Allocation Fund (DAK), Revenue Sharing Fund (DBH), and Regional Original Revenue (PAD). These funds are the primary source of financing for regional development, including infrastructure development, improving public services, and enhancing community welfare in Malang City. However, challenges remain, such as regional dependence on central transfers and limited regional fiscal capacity. Therefore, more effective, transparent, and accountable regional financial management is needed to ensure optimal and sustainable regional development.*

Keywords: *Central And Regional Financial Relations, Fiscal Decentralization, Regional Development, Regional Autonomy, Malang City.*

Abstrak: Hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah merupakan salah satu aspek penting dalam sistem pemerintahan desentralisasi di Indonesia. Melalui kebijakan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengelola keuangan daerah guna meningkatkan pelayanan publik dan mendorong pembangunan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan di Kota Malang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi literatur dari berbagai jurnal, dokumen kebijakan, dan laporan pemerintah terkait hubungan fiskal pusat dan daerah. Hasil kajian menunjukkan bahwa hubungan keuangan pusat dan daerah diwujudkan melalui mekanisme

transfer dana seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), serta Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dana tersebut menjadi sumber pembiayaan utama dalam pembangunan daerah, termasuk pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan publik, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kota Malang. Namun demikian, masih terdapat tantangan seperti ketergantungan daerah terhadap transfer pusat serta keterbatasan kapasitas fiskal daerah. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan keuangan daerah yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel agar pembangunan daerah dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Hubungan Keuangan Pusat Dan Daerah, Desentralisasi Fiskal, Pembangunan Daerah, Otonomi Daerah, Kota Malang.

PENDAHULUAN

Desentralisasi fiskal dapat mendorong ke arah ketidakstabilan ekonomi makro yang pada gilirannya akan menghambat pertumbuhan ekonomi. Hal yang sama juga ditegaskan dalam penelitian Phillips & Woller (1997) dan Davoodi & Zou (1998) bahwa adanya pengaruh negatif desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi dalam kasus di negara-negara berkembang. Hal ini juga konsisten dengan penelitian di Indonesia oleh Jumadi, Maski, & Khusaini (2013) dan Saputra & Mahmudi (2012) yang menunjukkan pengaruh ke arah negatif.

Oates (1993), Bird (1993) dan Bahl, R. W. & Linh (1992) menyatakan bahwa dengan adanya kewenangan desentralisasi fiskal diharapkan layanan kepada masyarakat akan semakin efisien dan ujungnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Selain itu, penelitian Zhang, T., & Zou (2001) juga menunjukkan bahwa desentralisasi memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di India. Oates (1993) berpendapat bahwa desentralisasi dipandang sebagai suatu langkah untuk meningkatkan efisiensi pemerintahan, mengurangi defisit anggaran dan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi.

Dalam konteks otonomi daerah, salah satu faktor yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah adalah desentralisasi fiskal. Sebagian besar ekonom percaya bahwa desentralisasi fiskal dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, memperbaiki pemerataan, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat dan sebagian lain berpandangan sebaliknya (Saputra & Mahmudi, 2012). Penelitian Amagoh & Ajab Amin (2012) menyatakan bahwa desentralisasi fiskal yang efektif dipengaruhi oleh kerangka kelembagaan yang bersifat komprehensif sehingga kebijakan desentralisasi fiskal menghasilkan manfaat tambahan bagi akuntabilitas, pendapatan, dan otonomi politik serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa

dalam literatur teoritis lebih condong mendukung hubungan positif antara desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi.

Pembangunan daerah merupakan bagian penting dari pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kesenjangan antarwilayah. Dalam sistem pemerintahan Indonesia, pelaksanaan pembangunan daerah tidak terlepas dari hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, terutama dalam aspek keuangan. Hubungan keuangan ini menjadi salah satu instrumen penting dalam pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal.

Desentralisasi fiskal memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya keuangan secara mandiri guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik. Kebijakan ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta mempercepat pembangunan wilayah sesuai dengan potensi dan kebutuhan masing-masing daerah. Dalam praktiknya, hubungan keuangan pusat dan daerah di Indonesia diatur melalui berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur pembagian sumber pendapatan dan mekanisme transfer fiskal dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

Hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah pada dasarnya merupakan suatu sistem yang mengatur bagaimana sumber daya keuangan negara dialokasikan antara berbagai tingkat pemerintahan. Sistem ini mencakup proses pengumpulan pendapatan, pengalokasian anggaran, serta pengawasan terhadap penggunaan anggaran tersebut dalam mendukung kegiatan pembangunan daerah.

Dalam konteks pembangunan daerah, transfer keuangan dari pemerintah pusat memainkan peran penting karena sebagian besar daerah di Indonesia masih memiliki kapasitas fiskal yang terbatas. Oleh karena itu, pemerintah pusat memberikan berbagai bentuk dana transfer seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) untuk membantu pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi pemerintahan dan pembangunan. Dana transfer tersebut digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan seperti pembangunan infrastruktur, pelayanan kesehatan, pendidikan, serta pengembangan ekonomi lokal.

Kota Malang sebagai salah satu kota besar di Provinsi Jawa Timur memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi regional. Kota ini dikenal sebagai pusat pendidikan, pariwisata, serta perdagangan dan jasa. Dalam upaya meningkatkan kualitas pembangunan daerah, pemerintah Kota Malang membutuhkan dukungan keuangan yang memadai, baik yang

bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun transfer dari pemerintah pusat. Hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan di Kota Malang.

Meskipun kebijakan desentralisasi fiskal telah memberikan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah, masih terdapat berbagai tantangan dalam implementasinya. Salah satu tantangan utama adalah tingginya ketergantungan keuangan daerah terhadap pemerintah pusat. Hal ini menunjukkan bahwa kapasitas fiskal daerah masih belum sepenuhnya mampu mendukung kebutuhan pembangunan secara mandiri. Selain itu, pengelolaan keuangan daerah yang belum optimal juga dapat mempengaruhi efektivitas penggunaan anggaran pembangunan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan Kota Malang. Analisis ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai bagaimana mekanisme hubungan fiskal pusat dan daerah berperan dalam mendukung pembangunan daerah serta tantangan yang dihadapi dalam implementasinya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis secara mendalam mengenai hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan Kota Malang.

Metode penelitian kualitatif menekankan pada pemahaman fenomena secara komprehensif melalui analisis berbagai sumber informasi yang relevan. Penelitian kualitatif juga memungkinkan peneliti untuk menggambarkan secara sistematis hubungan antara kebijakan fiskal pemerintah pusat dengan pelaksanaan pembangunan di daerah.

1. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber, antara lain:

- Jurnal ilmiah yang membahas desentralisasi fiskal dan hubungan keuangan pusat dan daerah
- Buku dan artikel ilmiah terkait keuangan negara dan otonomi daerah
- Dokumen kebijakan pemerintah mengenai hubungan keuangan pusat dan daerah
- Laporan keuangan dan pembangunan daerah yang berkaitan dengan Kota Malang

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan studi literatur. Peneliti mengumpulkan berbagai sumber informasi yang relevan, kemudian melakukan seleksi dan analisis terhadap data yang berkaitan dengan hubungan keuangan pusat dan daerah serta dampaknya terhadap pembangunan daerah.

3. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Proses analisis meliputi beberapa tahap, yaitu:

- 1) Pengumpulan data, yaitu mengumpulkan berbagai literatur dan dokumen yang relevan dengan topik penelitian.
- 2) Reduksi data, yaitu memilih data yang relevan dengan fokus penelitian.
- 3) Penyajian data, yaitu menyusun informasi secara sistematis untuk memudahkan pemahaman terhadap hubungan keuangan pusat dan daerah.
- 4) Penarikan kesimpulan, yaitu menginterpretasikan hasil analisis untuk menjelaskan bagaimana hubungan keuangan pusat dan daerah berperan dalam mendukung pembangunan Kota Malang.

Dengan menggunakan metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai peran hubungan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Desentralisasi dalam konteks harafiah adalah lawan dari kata sentralisasi yang berarti pemusatan kekuasaan. Desentralisasi merupakan sebuah alat untuk mencapai salah satu tujuan bernegara, yaitu terutama memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan menciptakan proses pengambilan keputusan publik yang lebih baik dan menciptakan proses pengambilan keputusan publik yang lebih demokratis (Sidik, 2002). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak desentralisasi fiskal terhadap pembangunan daerah di Provinsi Malang. Berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan melalui berbagai sumber literatur, dapat dipahami bahwa hubungan keuangan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pembangunan di Kota Malang. Hubungan ini tidak hanya terbatas penyaluran dana, tetapi juga mencerminkan

bagaimana kebijakan desentralisasi fiskal dijalankan dalam praktik dalam pemerintahan daerah.

Melalui kebijakan disentralisasi fiskal, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengelola keuangan daerahnya sendiri sesuai dengan kebutuhan dalam potensi yang dimiliki. Dalam konteks Kota Malang, kewenangan ini dimanfaatkan untuk mendukung berbagai program pembangunan, baik di bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, maupun pembangunan ekonomi lokal.

Sumber keuangan daerah Kota Malang pada umumnya berasal dari dua komponen utama, yaitu dana transfer dari pemerintah pusat dan pendapatan Asli Daerah (PAD). Dana transfer meliputi dana alokasi umum (DAU), Dana alokasi khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH), DAU digunakan untuk membantu pemerataan keuangan antar daerah, DAK lebih difokuskan pada program-program tertentu yang menjadi prioritas nasional, sedangkan DBH merupakan pembagian pendapatan dari sumber daya tertentu.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pembangunan di Kota Malang. Melalui kebijakan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengelola keuangan daerah guna meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

Sumber pembiayaan pembangunan daerah masih didominasi oleh dana transfer dari pemerintah pusat, seperti DAU, DAK, dan DBH. Sementara itu, kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih relatif terbatas, sehingga menunjukkan bahwa tingkat kemandirian keuangan daerah belum sepenuhnya optimal.

Selain itu, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala, seperti ketergantungan terhadap pemerintah pusat, pengelolaan anggaran yang belum maksimal, serta perlunya peningkatan transparansi dan akuntabilitas. Kondisi ini menunjukkan bahwa perbaikan dalam tata kelola keuangan daerah masih sangat diperlukan.

Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu meningkatkan kemampuan dalam menggali potensi daerah untuk menambah PAD, serta memperbaiki sistem pengelolaan keuangan agar lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran. Dengan langkah tersebut, diharapkan pembangunan di Kota Malang dapat berjalan lebih optimal, mandiri, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bird and Vaillancourt. (2000). Fiscal decentralization in developing countries. Cambridge University Press.
- Gedeona, Hendrikus T. (2009) Desentralisasi Fiskal: Kajian Perbandingan Ketidakseimbangan Fiskal Vertikal Di Indonesia dan Jepang. Jurnal Ilmu Administrasi Volume VI No.2, 167-191
- Khusaini, Muhamad, (2006), Ekonomi Publik : Desentralisasi Fiskal dan Pembangunan Daerah, Malang : BPFE Unbraw.
- Sidik, Machmud, 2002, Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Sebagai Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal, Makalah Seminar Setahun Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah di Indonesia, Yogyakarta, 13 Maret 2002.
- Yuliati, T., 2002, Potensi Keuangan Daerah, Derajat Desentralisasi Fiskal dan Dampaknya Terhadap Kinerja Ekonomi Daerah di Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes dan Kota Tegal,(Tesis tidak dipublikasikan), Pascasarjana Institut Pertanian Bogor, Bogor